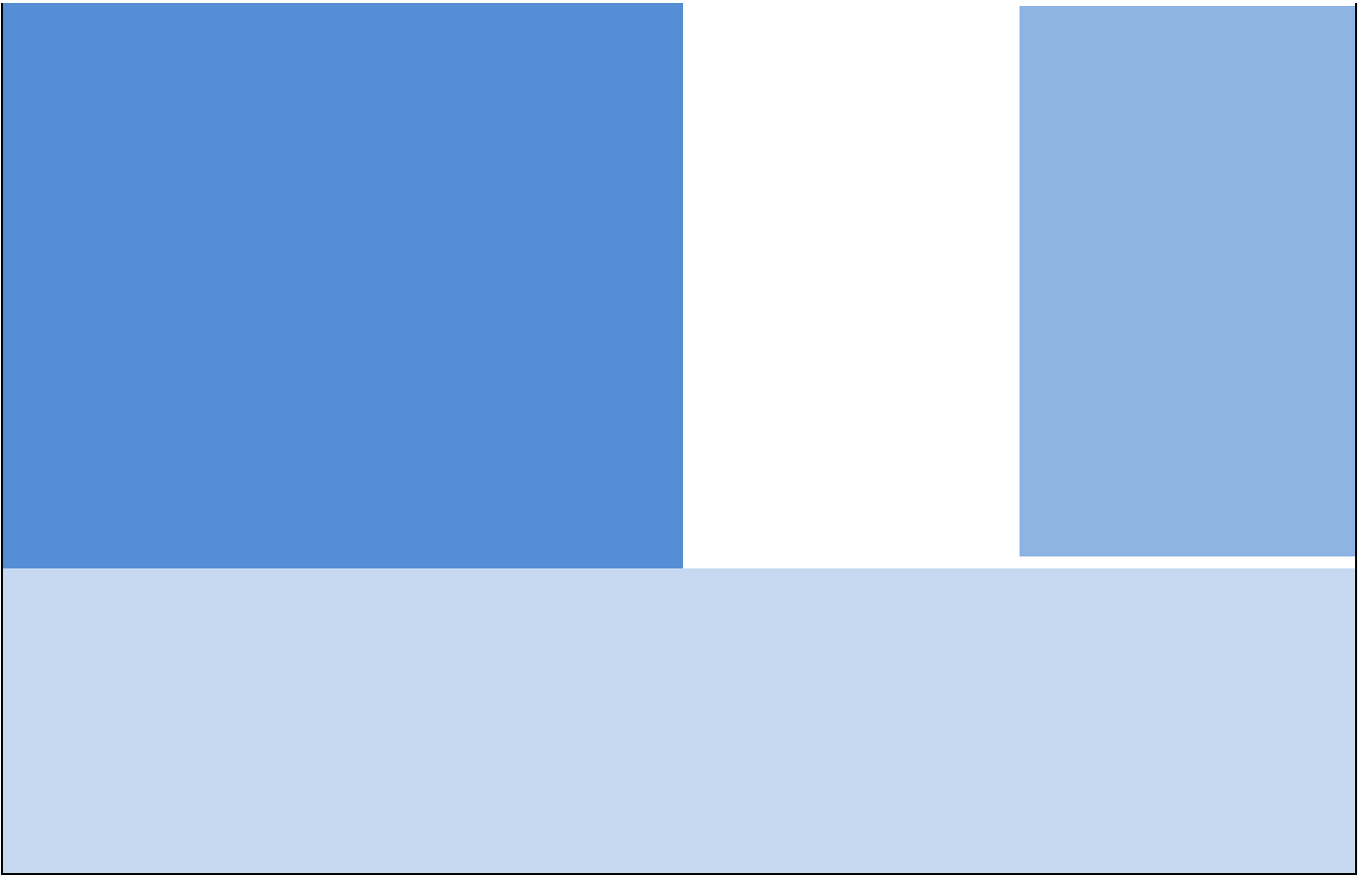




LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini.

LKjIP Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam suatu format laporan dimana proses penyusunannya mengacu kepada ketentuan – ketentuan hukum yang lebih tinggi.

LKjIP Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2019 telah selesai disusun dan hal ini dibarengi suatu harapan agar seluruh aparatur yang ada di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, dapat melakukan proses penilaian diri sendiri (self assessment) dengan memahami secara utuh serta menyeluruh kandungan LKjIP Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan untuk dapat mengevaluasi kinerja yang ada dalam upaya mendorong semangat demi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Sehingga untuk tahun – tahun berikutnya dapat diperoleh peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen LKjIP ini, namun kami senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dilingkungan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

Semoga harapan ini dapat terwujud dengan semakin dikembangkannya semangat kerjasama yang konstruktif dalam lingkup Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

Binjai Hulu, Desember 2019



CAMAT BINJAI HULU,

KUSNIDAR, S.Sos, MM

PEMBINA

NIP. 19730620 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kecamatan Binjai Hulu	2
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Permasalahan Utama	10
D. Sistematika Penyusunan LkjIP.....	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu	14
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV : PENUTUP	36
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan kedalam berbagai kebijakan politik baik teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Kecamatan Binjai Hulu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BINJAI HULU

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang. Pada Bab IV Pasal 4 Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Binjai Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

a) Camat

Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Fungsi Camat :

- 1) Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan, ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- 2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan di kecamatan.

- 3) Mengoordinasikan kegiatan kecamatan dan pemerintah desa dan atau kelurahan, ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- 4) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Fungsi Sekretariat Kecamatan :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan, dan protocol serta pengelolaan urusan kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan.
- 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 4) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan, program kerja dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 mempunyai tugas dibidang administrasi keuangan, laporan keuangan, dan mengoordinasikan penyusunan program kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 mempunyai tugas dibidang administrasi umum, penataan surat-surat dinas dan pelayanan administrasi kepegawaian.

c) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas kecamatan dibidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan, pemerintahan desa/kelurahan, serta mengoordinasikan penyelenggaraan kecamatan.

Fungsi Seksi Pemerintahan :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- 2) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dibidang pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan.
- 3) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- 4) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
- 5) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintahan desa.
- 6) Pengelolaan administrasi pertanahan.
- 7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset pemerintah kecamatan dan aset kekayaan desa/kelurahan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, polisi pamong praja, ketahanan masyarakat desa, serta mengoordinasikan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- 1) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- 3) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja.
- 4) Penyusunan program pelayanan perijinan di wilayah kecamatan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

- 1) Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi.
- 2) Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa.
- 3) Pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.
- 4) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.
- 5) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan di kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- 6) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan dibidang kegiatan pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan ketenagakerjaan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Penyusunan program, pembinaan pelayanan, dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang sumber daya desa.
- 5) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa.
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- 8) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan, kebersihan sarana dan prasarana umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

- 1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan kecamatan.
- 2) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
- 3) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan.
- 4) Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum.
- 5) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, kebersihan, perizinan, dan fasilitas umum.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Aparatur Pemerintahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Kecamatan Binjai Hulu didukung aparatur/pegawai sebanyak 15 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian,
Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS JENIS KELAMIN	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUM - LAH	
		a	b	c	d	A	B	C	D	A	B	c	d	A	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	PNS	L	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	2	3	1	1	-	-	13
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PNS		0	0	0	0	1	2	-	-	2	2	2	3	1	1	0	0	14	
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH TOTAL		0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	2	3	1	1	0	0	14	

Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri atas :

- a) S 2 = 3 orang
- b) S 1 = 4 orang
- c) D IV = 2 orang
- d) D III = 0 orang
- e) D II = 0 orang
- f) SMA = 3 orang
- g) SMP = 1 orang
- h) SD = 0 orang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Sarana dan Prasarana

Kegiatan di Kecamatan Binjai Hulu ini didukung oleh sarana dan prasarana kantor antara lain:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	3	1 Buah Aula 1 Kantor 1 Rumah Dinas Camat
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua)	1 Unit 8 Unit	
3	Laptop	8	
4	Komputer (Personal Computer)	4	3 Rusak
5	Mesin Ketik Manual	3	2 Rusak
6	TV Berwarna	2	
7	Meja Tulis	10	
8	Kursi Tamu	2	
9	Kursi Putar	7	
10	Meja Komputer	5	Rusak
11	Lemari Pakaian	2	
12	Brankas	1	Rusak
13	Filling Cabinet	6	
14	Meja kursi Tamu	1	
15	Rak Buku	4	
16	Printer	8 Buah	3 Rusak
17	Meja Kerja	17 Buah	
18	Kursi rapat	68 Buah	

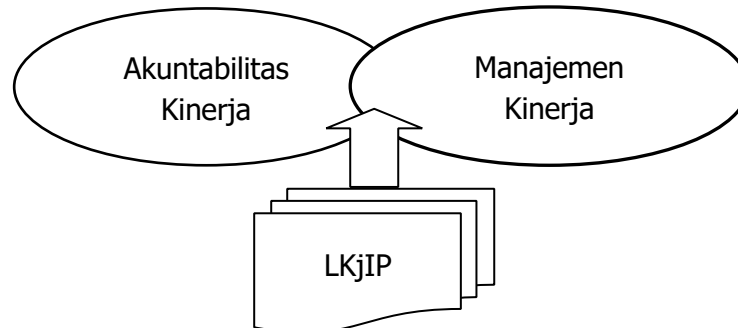
19	Sound System	4 Buah	
20	Micro Phone	2 Buah	
21	Radio SSB	1 Unit	
22	Parabola	1 Unit	
23	Pendingin AC	2 Unit	
24	Layar LCD	1 Buah	
25	Infocus	1 Buah	
26	Camera DSLR	1 Buah	
27	Proyektor & Attachment	1 Buah	

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LKJIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana Kecamatan Binjai Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 2
Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP 2019



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP Kecamatan Binjai Hulu mencakup hal-hal sebagai berikut :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Binjai Hulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEC ISSUED)

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia, yang terkait dengan wawasan, profesionalisme, potensi dan motivasi aparatur Kecamatan Binjai Hulu.
- 2) Faktor geografis/kondisi alam dan infrastruktur di Kecamatan Binjai Hulu yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.

3) Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu Hulu.

Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2019 disajikan sesuai dengan SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2019 adalah :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Permasalahan Utama (Stratec Issued)
- D. Sistematika LKjIP

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu
- B. Perjanjian Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Kecamatan Binjai Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Binjai Hulu saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu yang merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BINJAI HULU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Kecamatan periode tahun 2016-2021, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Kecamatan Binjai Hulu.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Binjai Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Binjai Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sintang dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, maka dapat ditetapkan Visi Kecamatan Binjai Hulu, yaitu:

**TERWUJUDNYA PELAYANAN KANTOR CAMAT YANG BAIK MENUJU
MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, PRODUKTIF DAN RELIGIUS**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan Misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa yang akan datang lebih baik.

Mengacu pada Visi Kecamatan Binjai Hulu dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang yang tercantum dalam Rancangan RPJMD, Kecamatan Binjai Hulu menetapkan Misi yang akan diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah :

- 1) Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) Meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan peran dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif.
- 3) Meningkatkan peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.
- 5) Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.

2. Analisa SWOT dalam Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal

Masalah merupakan kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Setiap masalah yang timbul disebabkan oleh hal-hal lain yang mempunyai hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi, oleh karenanya masalah perlu diupayakan pemecahannya.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam upaya pemecahan masalah sangat tergantung kepada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal apa yang cukup dominan mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Kecamatan Binjai Hulu. Faktor internal yaitu berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal yaitu berupa peluang dan ancaman.

Setelah dilakukannya identifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis strategis dengan menggunakan instrumen analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT ini merupakan alat yang dapat membantu dalam menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yaitu kondisi didalam organisasi dan kondisi diluar organisasi.

Dalam lingkungan internal dan eksternal, pada dasarnya terdapat 4 (empat) unsur yang selalu kita miliki dan kita hadapi. Secara internal kita memiliki

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal kita akan berhadapan dengan berbagai peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Kegiatan dalam rangka analisis lingkungan ini biasa disebut environmental scanning, yaitu pengamatan lingkungan untuk mendapatkan gambaran secara persis mengenai diri dan lingkungan kita.

Dalam bentuk yang sederhana, analisis SWOT dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang secara internal kita miliki, yang meliputi organisasi Kecamatan Binjai Hulu, Pemerintahan Desa, kondisi daerah Kecamatan Binjai Hulu, serta masyarakat Kecamatan Binjai Hulu.
- Melakukan identifikasi peluang dan ancaman yang kita hadapi pada lingkungan eksternal, yang meliputi organisasi diluar Kecamatan Binjai Hulu, dan kondisi organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Hasil dari identifikasi ini dilakukan analisis dalam bentuk uraian atau penjelasan dari masing-masing faktor secara ringkas.

a) Faktor Internal

1) Kekuatan (Strengths)

- Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas (job description).
- Adanya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Adanya situasi kerja yang kondusif dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

2) Kelemahan (weaknesses)

- Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.
- Kurangnya dana dan anggaran.
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

b) Faktor Eksternal

1) Peluang (Opportunities)

- Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam mewujudkan good governance.
- Mengembangkan program-program penguatan sumber daya manusia.
- Adanya komunikasi aktif dan umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

2) Ancaman / Tantangan (Threats) :

- Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu Hulu yang kurang mendukung.
- Buruknya infrastruktur berupa jalan dan jembatan ke Desa-Desa.
- Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

NO.	FAKTOR INTERNAL		
	Strengths (Kekuatan)		Weaknesses
S 1	Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas (job description).	W 1	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.
S 2	Adanya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tupoksi organisasi.	W 2	Kurangnya dana dan anggaran.
S 3	Adanya situasi kerja yang kondusif dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.	W 3	Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

FAKTOR EKSTERNAL			
Opportinities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
O 1	Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam mewujudkan good governance.	T 1	Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu Hulu yang kurang mendukung.
O 2	Mengembangkan programprogram penguatan sumber daya manusia.	T 2	Buruknya infrstruktur berupa jalan dan jembatan ke DesaDesa.
O 3	Adanya komunikasi aktif dan umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.	T 3	Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan Misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan pegawai dan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- 2) Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan baik di Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan.
- 3) Memberikan kejelasan prosedur kepada masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 4) Menghasilkan perencanaan dalam sektor ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum.

b) Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Binjai Hulu menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode

RENSTRA. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Binjai Hulu.

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN KANTOR CAMAT YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, PRODUKTIF DAN RELIGIUS			
MISI I : Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa. 2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang Efektif, Efisien (Cepat, Tepat dan Transparan), ramah dan adil. 3. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, responsif dan Kreatif. 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran setiap tahunnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 2. Meningkatkan efektifitas pelayanan administratif 3. Mengikuti Pelatihan , Bimbingan teknis dan Diklat 4. Menambah kualitas dan kuantitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa. 2. Penguatan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah. 4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.

MISI II : Meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan peran dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 Tahun dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai keterampilan.	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan formal dan informal.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal	Peningkatan jumlah pembinaan kepada masyarakat agar cerdas dan kreatif.

MISI III : Meningkatnya peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup bersih, sehat dan peduli layanan Posyandu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. 2. Meningkatnya sinergistas pengusulan program dan kegiatan kesehatan desa dan kecamatan. 3. Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan secara reguler, menyeluruh dan berkelanjutan. 	Menerapkan pola perencanaan partisipatif.	Pengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

MISI IV : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi keluarga yang mandiri, penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan kreatif dalam berbagai usaha ekonomi.	1. Terwujudnya pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial. 2. Terwujudnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga. 3. Meningkatnya pelaku UKM dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.	Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

MISI V : Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan toleransi umat beragama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan. 3. Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama. 	Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.	Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkenaan dengan hal tersebut Camat Binjai Hulu telah menandatangani Perjanjian Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binjai Hulu.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang termuat didalam dokumen Perjanjian kinerja Kecamatan Binjai Hulu Tahun Anggaran 2019 antara lain dapat dilihat pada lampiran LKjIP Kecamatan Binjai Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Binjai Hulu Kab. Sintang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama menurut sasaran pembangunan diuraikan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja

B. Organisasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun Karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Binjai Hulu tahun 2019, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 dan APBD serta Perubahan APBD Tahun 2019.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2021, Kecamatan Binjai Hulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagai dasar Rencana Kerja Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2019. Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

1) Pengukuran Kinerja

a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam

metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (Outcome). Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Kantor Camat Binjai Hulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	SB	B	CB	TB
1	Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg dimonitor dan evaluasi dalam pengelolaan ADD	100%			
		Jumlah Desa yg melaksanakan Musrenbang Desa	99,90%			
		Jumlah Desa yg difasilitasi dalam penyampaian SPT dan optimalisasi pemungutan PBB	100%			
		Jumlah Desa yg difasilitasi dalam pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	100%			
2.	Terwujudnya pembinaan kepemudaan, wanita dan olah raga	Jumlah Turnamen Sepak Bola Bupati Cup yg dilaksanakan	100%			
		Jumlah PKK Desa yg dibina	100%			
3.	Terwujudnya Pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan	Jumlah gawai dayak yg diikuti	100%			
4.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yg efektif, efisien, ramah dan adil	Persentase pelayanan administrasi di kecamatan	80%			
		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan di desa	100%			
5.	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan forman dan informal	Jumlah sekolah yg dimonitor	100%			
6.	Terwujudnya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial	Jumlah operasi pasar yg dilaksanakan	100%			

		Jumlah titik distribusi Raskin yg dimonitor	100%			
7.	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yg kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah	Jumlah satlinmas yg dibina	100%			
		Jumlah koordinasi pemecahan permasalahan perkebunan	100%			

2) Evaluasi Kinerja

Perolehan capaian IKU terhadap sasaran selama tahun 2019 cukup variatif. Berikut ini evaluasi, analisis, dan penjelasan capaian IKU Tahun 2019.

Sasaran I : Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 127.855.500,00 telah terealisasi senilai Rp 127.820.500,00 atau 99,97% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	19.380.000,00	19.380.000,00	100%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan Kecamatan	35.190.500,00	35.155.500,00	99,90
	Optimalisasi PBB	10.000.000,00	10.000.000,00	100%

Program peringatan hari besar nasional/daerah	Peringatan HUT Republik Indonesia	63.285.000,00	63.285.000,00	100%
---	-----------------------------------	---------------	---------------	------

Kinerja Sasaran "Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Jumlah Desa yg dimonitor dan evaluasi dalam pengelolaan ADD	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	
2	Jumlah Desa yg melaksanakan Musrenbang Desa	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	
3	Jumlah Desa yg difasilitasi dalam penyampaian SPT dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	
4	Jumlah Desa yg difasilitasi dalam pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (99,97%), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Desa yg dimonitor dan evaluasi dalam pengelolaan ADD dengan target 100 % dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti dalam menyelesaikan administrasi sudah berjalan baik. Diharapkan kedepan nanti Desa yang menyelesaikan SPJ Dana ADD tepat waktu di Kecamatan Binjai Hulu dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 yang sebesar 81,82% mengalami kenaikan 18,18% pada tahun 2019.
2. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang dengan target 11 Desa dengan realisasi 11 Desa sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti dalam melaksanakan Musrenbang sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan hingga dilaksanakannya Musrenbang yang akan datang menjadi lebih maksimal. Diharapkan kedepan nanti melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Binjai Hulu dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan.
3. Jumlah Desa yg difasilitasi dalam penyampaian SPT dan optimalisasi pemungutan PBB dengan target 11 Desa, terealisasi 11 Desa sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti Persentase masyarakat yang membayar PBB tepat waktu sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan Persentase masyarakat yang membayar PBB tepat waktu menjadi maksimal di Desa Se-Kecamatan Binjai Hulu. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan pada tahun 2019.
4. Jumlah Desa yg difasilitasi dalam pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dengan target 1 desa dapat terealisasi, yg berarti dalam peringatan hari besar nasional sudah berjalan dengan baik. Hal ini agar dipertahankan menyangkut fasilitasi pelaksanaan perayaan hari besar nasional agar lebih maksimal, dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi kinerja 100% tidak mengalami kenaikan pada tahun 2019.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- a) Masih ada beberapa desa yang terlambat dalam membuat SPJ ADD baik yang Pencairan Tahap I maupun Tahap II.

- b) Ada tambahan Dana Desa dari pusat sedangkan kualitas aparatur desa masih sangat minim dalam pengelolaan keuangan di desa.
- c) Data wajib pajak perlu dilakukan pemuktahiran

Upaya Pemecahan Hambatan dan Kendala pencapaian sasaran ini adalah :

- a) Melakukan bimtek Kades dan Perangkat Desa serta Bendahara.
- b) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa secara intensif.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dengan penyuluhan termasuk kepada petugas yg memungut pajak

Sasaran II : Terwujudnya pembinaan kepemudaan, wanita dan olah raga

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 77.680.000,00 telah terealisasi senilai Rp. 77.680.000,00 atau 100% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Progrm	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Pertandingan sepak blola Bupati Cup	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	22.680.000,00	22.680.000,00	100%

Kinerja Sasaran " Terwujudnya pembinaan kepemudaan, wanita dan olah raga" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Pertandingan sepak bola Bupati Cup yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100	Outcome
2.	Jumlah PKK Desa yg dibina	Desa	5	5	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Turnamen sepak bola Bupati Cup yang dilaksanakan yang dilaksanakan dengan target 1 (satu) kali kegiatan, terealisasi 1 kegiatan sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti jumlah Turnamen sepak bola Bupati Cup yang dilaksanakan sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan keikutsertaan Turnamen sepak bola Bupati Cup sehingga dapat meningkatkan bakat pemuda khususnya pada bidang olahraga sepak bola. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan 100% pada tahun 2019.
2. Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskesdes dan PKK dengan target 5 Desa dan terealisasi 5 Desa sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti dalam Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskesdes dan PKK sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan hingga dilaksanakan Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskesdes dan PKK yang akan datang. Diharapkan kedepan nanti Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa Tingkat Kecamatan di Kecamatan Binjai Hulu dapat dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan target. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan pada Tahun 2019.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Terbatasnya anggaran untuk mengikuti kegiatan PKK tingkat kabupaten.

- b. Masih minimnya kegiatan yang mampu diakomodir oleh anggaran yang tersedia.

Upaya Pemecahan Hambatan dan Kendala pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Perlunya tambahan anggaran untuk memaksimalkan program PKK Kecamatan

Sasaran III : Terwujudnya Pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 15.600.000,00 telah terealisasi senilai Rp 15.600.000,00,00 atau 100% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pengembangan Nilai Budaya	Gawai dayak	15.600.000,00	15.600.000,00	100

Kinerja Sasaran " Terwujudnya Pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Gawai Dayak yg diikuti	Kegiatan	1	1	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekan Gawai Dayak di Kabupaten Sintang dengan target 1 Kegiatan, terealisasi 1 Kegiatan sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti dalam Pelaksanaan Pekan Gawai Dayak di Kabupaten Sintang sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan hingga dilaksanakan Gawai Dayak yang akan datang. Diharapkan kedepan nanti Pelaksanaan Pekan Gawai Dayak di Kabupaten Sintang

dapat dilakukan semaksimal mungkin. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan

Hambatan dan kendala dalam Pencapaian sasaran ini :

- a. Terbatasnya anggaran untuk mengikuti kegiatan Gawai Dayak di Tingkat Kabupaten

Upaya pemecahan hambatan dan kendala pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Perlunya penambahan anggaran untuk memaksimalkan program kegiatan Gawai Dayak.

Sasaran IV : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yg efektif, efisien, ramah dan adil

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 34.986.000,00 telah terealisasi senilai Rp 34.881.000,00 atau 99,46% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	9.986.000,00	9.966.000,00	99,80
Program penataan administrasi kependudukan	Pelaksanaan E-KTP	25.000.000,00	24.915.000,00	99,66

Kinerja Sasaran "Terwujudnya pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Persentase pelayanan administrasi perizinan di kecamatan	Persen	80	60	75	Outcome
2.	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Desa	11	11	100	Outcome

Capaian Sasaran (Outcome)	75	
---------------------------	----	--

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah pelayanan administrasi perijinan di Kecamatan dengan target 80% dan realisasi 60 % Desa sehingga capaian kinerjanya yaitu 75%, yang berarti Jumlah pelayanan administrasi perijinan di Kecamatan sudah berjalan cukup baik. Hal ini agar menjadi evaluasi kedepannya dikarenakan pelayanan perijinan di Kecamatan Binjai Hulu minimal harus mencapai target. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 57% mengalami kenaikan.
2. Jumlah Perekaman E-KTP di Kecamatan dengan target 11 Desa dan dapat direalisasikan 11 Desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses melengkapi administrasi kependudukan masyarakat sangat baik dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan cukup tinggi. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yg sebesar 100% tidak mengalami kenaikan.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Kurangnya kesadaran Pelaku usaha akan pentingnya perijinan.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi perijinan.

Upaya Pemecahan Hambatan dan Kendala pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Membuat SOP dalam PelayananTerpadu Kecamatan.

Sasaran V : Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 6.500.000,00 telah terealisasi senilai Rp 6.500.000,00 atau 100% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Monitoring kegiatan kinerja dan akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	6.500.000,00	6.500.000,00	100

Kinerja Sasaran “ Meningkatkan jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sekolah yg dimonitoring	Sekolah	6	6	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah sekolah yg dimonitoring untuk kinerja dan akuntabilitas guru sebanyak 6 sekolah dan dapat direalisasikan sebanyak 6 sekolah. Hal ini bertujuan agar kinerja dan akuntabilitas guru semakin membaik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik di sekolah. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100% maka tidak mengalami peningkatan.

Sasaran VI : Terwujudnya pembinaan pelayanan dan bantuan social

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 29.532.160,00 telah terealisasi senilai Rp 29.532.160,00 atau 100% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Penunjang pengendalian inflasi daerah	10.064.160,00	610.064.160,00	100
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin	19.468.000,00	19.468.000,00	100

Kinerja Sasaran " Terwujudnya pembinaan pelayanan dan bantuan **social**" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah operasi pasar yg dilaksanakan	kegiatan	2	2	100	Outcome
2.	Jumlah titik distribusi raskin yg dimonitor	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Kegiatan Operasi Pasar yang dilaksanakan dengan target 2 (dua) kali kegiatan, terealisasi 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti jumlah Kegiatan Operasi Pasar yang dilaksanakan sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan karena Kegiatan Operasi Pasar sehingga dapat menunjang pengendalian inflasi di Kecamatan Binjai Hulu. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan.
2. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor dengan target 11 Desa dan realisasi 11 Desa sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%, yang berarti Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor sudah berjalan sangat baik. Hal ini agar dipertahankan dalam

pendistribusian raskin menjadi maksimal di Desa Se-Kecamatan Binjai Hulu. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 100% tidak mengalami kenaikan.

Sasaran VII : Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yg kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 29.532.160,00 telah terealisasi senilai Rp 29.532.160,00 atau 100% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	9.760.000,00	.760.000,00	100
Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	12.366.000,00	12.366.000,00	100

Kinerja Sasaran " Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yg kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pembinaan Satlinmas Desa	Desa	6	6	100	Outcome
2.	Jumlah koordinasi pemecahan masalah perkebunan	Desa	11	11	100	Outcome
Capaian Sasaran (Outcome)					100	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan target 6 Desa, terealisasi 6 Desa, sehingga capaian kerjanya yaitu 100%, Pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Binjai hulu sudah berjalan baik. Hal ini agar dipertahankan karena Pembinaan ketentraman dan ketertiban sangat penting mengingat di beberapa desa telah terjadi permasalahan ketertiban. Rrealisasi kinerja tahun 2019 yang sebesar 100% sama dengan tahun 2018.
2. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan dengan target 2 Kegiatan dan terealisasi 2 Kegiatan sehingga capaian kerjanya yaitu 100%, yang berarti dalam Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan sudah berjalan baik. Hal ini agar dipertahankan karena Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan masih sangat diperlukan mengingat di Kecamatan Binjai Hulu terdapat beberapa perusahaan sawit dan juga perkebunan besar. Jika Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 75%, mengalami kenaikan sebesar 25% pada Tahun 2019.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Terbatasnya waktu dalam mediasi masalah perkebunan.
- b. Sarana dan prasarana dalam penyelesaian masalah perkebunan masih belum memadai.

Upaya Pemecahan Hambatan dan Kendala pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Penyelesaian masalah perkebunan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya.
- b. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan membentuk tim

B. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBD berjumlah **Rp 2.535.937.813,00** dengan realisasi sebesar **Rp 2.280.052.094,00** atau **89,91 %** dari anggaran (keadaan sampai 31 Desember 2019) dengan rincian sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	2.535.973.823,00	2.280.052.094,00	255.921.729,00	89,91
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.563.296.653,00	1.319.463.897,00	243.832.756,00	84,40
	Belanja Pegawai	1.563.296.653,00	1.319.463.897,00	243.832.756,00	84,40
	BELANJA LANGSUNG	972.641.160,00	960.588.197,00	12.052.936,00	98,76
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	344.545.060,00	344.310.405,00	234.655,00	99,93
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	100,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	26.433.000,00	26.433.000,00	0,00	100,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.797.500,00	8.794.500,00	3.000,00	99,97
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	28.895.000,00	28.885.700,00	9.300,00	99,97
1.7	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	26.010.000,00	25.426.766,00	583.234,00	97,76
1.8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	63.020.000,00	62.930.000,00	90.000,00	99,86
1.9	Penyediaan tenaga kontrak	95.730.000,00	95.730.000,00	0,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	316.980.000,00	313.514.000,00	3.190.000,00	98,91
2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	47.050.000,00	43.860.000,00	3.190.000,00	93,22
2.2	Pengadaan meubeleur	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	100,00
2.3	Pengadaan perangkat komputer dan printer	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	100,00
2.4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	100,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	199.724.000,00	276.000,00	99,86
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	38.360.000,00	33.098.300,00	5.261.700,00	86,28
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	38.360.000,00	33.098.300,00	5.261.700,00	86,28
5	Program Peringatan Hari Besar nasional dan Daerah	63.285.000,00	63.285.000,00	0,00	100,00
5.1	Peringatan HUT Republik Indonesia	63.285.000,00	63.285.000,00	0,00	100,00
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00
6.1	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00
7	Program Penatan Administrasi Kependudukan	25.000.000,00	24.915.00,00	85.000,00	99,66
7.1	Pelaksanaan E-KTP	25.000.000,00	24.915.00,00	85.000,00	99,66
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	19.468.000,00	19.468.000,00	0,00	100,00
8.1	Monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin	19.468.000,00	19.468.000,00	0,00	100,00
9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.064.160,00	10.064.160,00	0,00	100,00
9.1	Penunjang inflasi daerah	10.064.160,00	10.064.160,00	0,00	100,00
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	90.222.500,00	90.222.500,00	0,00	100,00
10.1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	35.190.500,00	35.190.500,00	0,00	100,00
10.2	Pembinaan kesejahteraan keluarga	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	100,00
10.3	Optimalisasi pengelolaan PBB	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
10.4	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	9.986.000,00	9.986.000,00	0,00	100,00
10.5	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	12.366.000,00	12.366.000,00	0,00	100,00
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	100,00
11.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan ADD	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
12	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
12.1	Monitoring kegiatan kinerja dan akuntabilitas guru (KIAT Guru)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
13	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
13.1	Pertandingan sepak bola Bupati Cup	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
14	Program Pengembangan Nilai Budaya	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00
14.1	Gawai Dayak	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.535.973.813,00	2.280.052.094,00	255.885.719,00	89,91
SURPLUS/DEVISIT		(2.535.973.813,00)	(2.280.052.094,00)	255.885.719,00	89,91

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari LKJIP Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja semuanya dapat terpenuhi walaupun belum maksimal. Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Binjai Hulu untuk Tahun 2016 – 2021 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik hal ini akibat dari keterbatasan anggaran.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih harus ditingkatkan, keterbukaan dan sebagainya.

Hal-hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2018 sudah dirasakan mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan masalah guna terciptanya suatu hasil kinerja yang produktif meliputi :

- a. Meningkatkan SDM melalui peningkatan dan kemampuan baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

- b. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas kinerja Aparatur.
- c. Memberdayakan Rencana Straregis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 melalui kesungguhan pegawai Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
- d. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang tersedia, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Merujuk kepada capaian kinerja tersebut diatas, maka Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sudah mendekati dengan apa yang diharapkan. Namun dengan pencapaian tersebut tidaklah harus berpuas diri, akan tetapi keberhasilan yang telah diperoleh diharapkan mampu memacu produktifitas seluruh staf di lingkungan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari hari ke hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta secara periodik senantiasa dilakukan evaluasi dan perbaikan atas capaian kinerja yang dianggap masih belum optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan yang telah tercapai pada Tahun 2019 tersebut.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN BINJAI HULU
Jalan Lintas Sintang – Nanga Ketungau 78651

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSNIDAR, S.Sos, MM

Jabatan : Camat Binjai Hulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, Ph.

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG

Sintang, Januari 2019
Pihak Pertama,
CAMAT BINJAI HULU

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH.

KUSNIDAR, S.Sos, MM
Pembina TK.I
NIP. 19730621 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BINJAI HULU
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran setiap tahunnya.	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor	15 Kegiatan
		Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor	2 Kegiatan
2	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, responsif dan Kreatif.	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan	3 Orang
3	Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan evaluasi pengelolaan ADD	11 Desa
		Jumlah Desa yg melaksanakan Musrenbang tingkat desa	11 Desa
		Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi pemungutan PBB	11 Desa
		Jumlah desa yg difasilitasi dalam pelaksanaan peringatan hari besar Nasional	1 Desa
4	Terwujudnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.	Jumlah Turnamen Sepak Bola Bupati Cup yg dilaksanakan.	1 Kegiatan
		Jumlah PKK Desa yg dibina	5 Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
5	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal	Jumlah sekolah yg dimonitor	6 Sekolah
6	Terwujudnya pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	2 Kegiatan
		Jumlah titik distribusi Raskin yg dimonitor	11 Desa
7	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang Efektif, Efisien (Cepat, Tepat dan Transparan), ramah dan adil.	Persentase Pelayanan administrasi perizinan di kecamatan	85 %
		Persentase Pelayanan administrasi kependudukan	11 Desa
8	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Pekan Gawai Dayak yg diikuti	1 Kegiatan
9	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah Satlinmas yang dibina	5 Desa
		Jumlah Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	1 Kegiatan

**RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU TAHUN 2019**

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	344.545.060,00	APBD
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	316.980.000,00	APBD
3...	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.000.000,00	APBD
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	38.360.000,00	APBD
5.	Program Peringatan Hari Besar nasional dan Daerah	63.285.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9.760.000,00	APBD
7.	Program Penatan Administrasi Kependudukan	25.000.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	19.468.000,00	APBD
9.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.064.160,00	APBD
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	90.222.500,00	APBD
11.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	19.380.000,00	APBD
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6.500.000,00	APBD
13.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	50.000.000,00	APBD
14.	Program Pengembangan Nilai Budaya	15.600.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		972.641.160,00	

Sintang, Januari 2019



Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Pihak Pertama,
CAMAT BINJAI HULU

KUSNIDAR, S.Scs, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730621 200212 1 005